

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA BISNIS SKEMA
PONZI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

VICKY RHIZALDY
NIM. 145010100111082



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
PADA BISNIS SKEMA *PONZI* DI INDONESIA**

VICKY RHIZALDY
NIM : 145010100111082

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal
dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Bambang Winarno, S.H., MS
NIP. 195301211979031002

Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H
NIP. 201304 830723 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso, S.H., LLM
NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, Mei 2018

Yang Menyatakan

Vicky Rhizaldy

NIM. 145010100111082



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADABISNIS SKEMA *PONZI* DI INDONESIA**, dengan baik.

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan selama 5 bulan terhitung mulai bulan Desember 2017 sampai Mei 2018. Adapun dalam laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan berkat dorongan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Allah SWT, karena berkat limpahan berkah dan rahmatNya saya akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir saya ini dan memperoleh gelar sarjana saya.

Yang selalu saya cintai:

1. Mama dan Papaku.. doamu setiap hari, sepanjang malam tak pernah putus kau panjatkan hanya untuk anakmu ini meraih kesuksesan. Nasehat serta saran yang kalian berikan selalu membuatku terus belajar untuk menjadi lebih dewasa
2. Adikku Nanda, terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan kepadaku.
3. Georgina Tara yang selalu menemaniku dan memberikan support dalam suka maupun duka untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Sahabat-sahabatku M. Indra Setia Hadi, Avi Tiara Putri, Amalia Rizki, Oktary Devira, Fidya Titisari, Mia Yunisa, Natasha Alwi, Yuke Yuanisa, Algy Ferlyando, yang selalu memberikan bantuan serta dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh rekan tim Macabre Player yang selalu mendukung dan memberikan inspirasi guna mempercepat penyelesaian tugas akhir ini.
6. Seluruh rekan tim Indies Organizer yang telah memberikan saya pengalaman baru, mengenalkan orang-orang baru dan juga support serta motivasi yang selalu diberikan kepada saya.

Yang saya hormati:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH. LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan masukan dan izin kepada saya dalam penulisan tugas akhir saya.
3. Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S, selaku dosen pembimbing utama saya yang telah memberikan masukan-masukan serta motivasi kepada saya untuk dapat menyempurnakan hasil tugas akhir saya ini dan sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini.
4. Ibu Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah memberikan bimbingan dan masukan dengan sabar, bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkanku sampai terselesainya tugas akhir ini.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang telah membantu penulis dan memberikan informasi – informasi penting dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati agar nantinya dapat berguna bagi diri penulis ataupun orang lain.

Malang, Mei 2018

(Vicky Rhizaldy)

RINGKASAN

Vicky Rhizaldy, Bambang Winarno, Diah Pawestri Maharani, vickyrhizaldy@ymail.com, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA BISNIS SKEMA *PONZI* DI INDONESIA.

Di dalam sebuah negara yang sedang memacu laju perekonomiannya, arus investasi merupakan sektor yang akan selalu diperhitungkan dan dimaksimalkan dari segala potensi dan elemen yang dimiliki untuk dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan guna memenuhi tujuan dan cita-cita negara Indonesia sebagaimana dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu demi tercapainya kesejahteraan umum. Namun, seiring berkembangnya dunia investasi secara global, kemudian terdapat beberapa metode-metode investasi yang ditawarkan, mulai dari investasi yang legal sampai skema investasi yang ilegal.

Salah satu investasi ilegal yang sudah diakui di dunia adalah skema *ponzi*, skema ini di dalam kasusnya selalu mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap para investornya, namun nyatanya regulasi di Indonesia masih belum mengatur mengenai larangan investasi dengan skema *ponzi* ini secara jelas. Sejauh ini hanya skema piramida yang sudah diatur dan disebutkan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Oleh sebab itu penulis merasa bahwa perlu diatur mengenai skema *ponzi* ini baik di dalam Undang-Undang ataupun peraturan lainnya, karena pada kenyataannya *ponzi* dan piramida yang sering disamakan ini memiliki perbedaan diantara keduanya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan *statue approach* dan *conseptual approach*. Penulis juga menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu metode analisa data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini akan membahas mengenai upaya hukum apa yang sudah diberikan oleh pemerintah guna memberikan perlindungan hukum kepada para investor yang dirugikan akibat aktivitas investasi ilegal tersebut yang salah satunya adalah *ponzi*. Selain itu juga akan dijabarkan mengenai upaya dari OJK selaku regulator dan pengawas terhadap aktifitas dunia lembaga keuangan maupun investasi di Indonesia. Serta langkah kedepan yang harus dilakukan oleh pemerintah guna memberikan kejelasan mengenai status investasi *ponzi* dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan.

SUMMARY

Vicky Rhizaldy, Bambang Winarno, Diah Pawestri Maharani, vickyrhizaldy@ymail.com Business Law, Faculty of law, Brawijaya University, may 2018, Legal Protection of Investors Involved in Ponzi Scheme Business in Indonesia

For a country which is pushing its economic growth, the investment flow is a sector that will always be counted and maximized from every potentials and elements it has, thus allowing the sustainable development to be implemented as one of the country's ideals as in the Preamble of State Constitution of Republic of Indonesia of 1945; the realization of general welfare. Later on, as the investment industry is developing globally, hence there are many offered investment methods, ranging from the legal to illegal ones.

One of the known fraudulent investment is Ponzi, which scheme is causing enormous losses to investors, however there is no clear applicable law in Indonesia to ban the Ponzi Scheme investment practice. Until recently, only Pyramid Scheme is covered as stated in Article 9, Act Number 7 of 2014 on Trade. Based on this issue, the Author believe that it is necessary to regulate on behalf of Ponzi Scheme whether in an Act or other regulations for both Ponzi and Pyramid Scheme are oftenly confused by being similar, while there are differences between them.

This research conducted by the Author is a juridicial-normative research with statute and conceptual approach methods. The related legal material is analyzed using qualitative data technique, reffered to descriptive analytical method which then connected to expert doctrines and the applicable law.

This research will examine the legal act undertaken by the Government of Indonesia to provide the legal protection of Investors who suffer losses due to illegal investment activities, including Ponzi. Moreover, this research will describe the legal act undertaken by Indonesian Finance Authority (OJK) the regulator and supervisor of investment activities in Indonesia, as well as the next actions that should be conducted by the Government to provide the legal certainty in Ponzi's investment status and legal protection for investors who suffer losses.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Ringakasan	v
<i>Summary</i>	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Perlindungan Hukum	13
B. Kajian Tentang Hukum Investasi	15
1. Pengertian Hukum Investasi	15
2. Jenis-Jenis Investasi	17
a. Investasi Berdasarkan Bentuk	17
b. Investasi Berdasarkan Aset	18
c. Investasi Berdasarkan Pengaruh	19

d. Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaan	19
C. Kajian Umum Tentang Investor.....	19
D. Kajian Umum Tentang Bisnis.....	23
1. Pengertian Bisnis	23
2. Tujuan Bisnis	24
E. Kajian Umum Tentang <i>Ponzi</i>	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	29
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	31
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31
F. Definisi Konseptual	34
G. Sistematika Penulisan	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

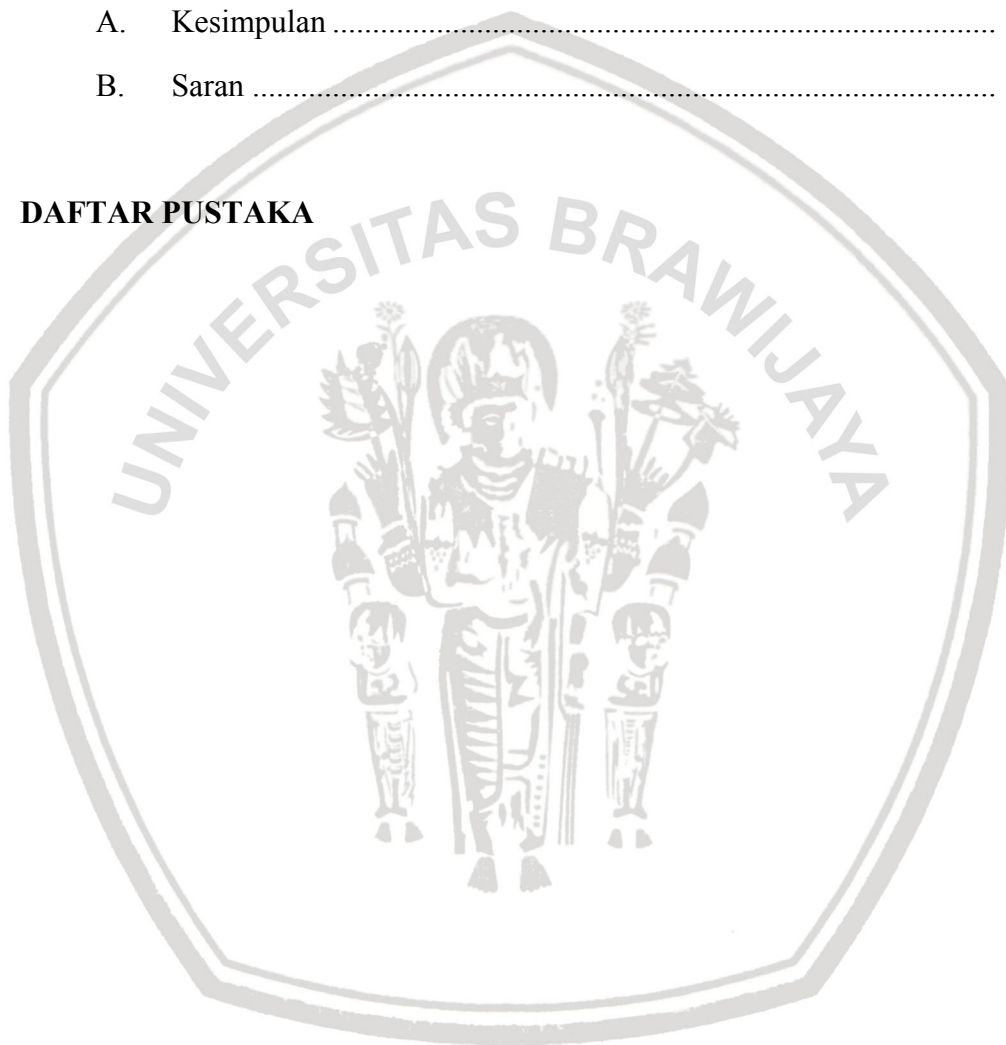
A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema <i>Ponzi</i> di Indonesia	38
1. Perbedaan Skema <i>ponzi</i> , piramida, dan MLM.....	41
a. <i>Ponzi</i>	41
b. Piramida	45
c. <i>Multi Level Marketing</i> (MLM).....	50
2. Regulasi dan Syarat Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL).....	53
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	59

B.	Peran OJK Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Investor Dalam Skema <i>Ponzi</i>	63
1.	Preventif.....	68
2.	Represif.....	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penelitian Terdahulu	8
----------	----------------------------	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bentuk Piramida Downline 2 (Binary)	46
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara berkembang, pemerintah wajib untuk mengembangkan dan memaksimalkan segala potensi dan elemen yang dimiliki oleh negara Indonesia untuk dapat menjalankan pembangunan yang berkelanjutan guna memenuhi tujuan negara Indonesia, sebagaimana yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu demi tercapainya kesejahteraan umum¹.

Dalam proses pembangunan, pemerintah tentu memerlukan perputaran uang dengan jumlah besar dan bersamaan dengan hal tersebut diperlukan adanya penanaman modal ataupun investasi. Untuk dapat melakukannya, negara tidak dapat hanya bergantung pada modal pemerintah lewat BUMN nya saja, namun juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor barang ataupun jasa atau yang biasa disebut dengan *investee*.

Di kalangan masyarakat, investasi memiliki konotasi yang lebih luas karena mencakup investasi langsung (*Direct Investment*) dan investasi

¹Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

tidak langsung (*Portofolio Investment*), sedangkan penanaman modal lebih condong kepada investasi langsung.² Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, hal tersebut telah memberikan sebuah landasan ataupun payung hukum di dalam proses berinvestasi baik bagi penanam modal asing maupun dalam negeri. Namun, perkembangan dunia perekonomian dan investasi yang terus berkembang serta dengan segala permasalahan di dalamnya, maka Undang-Undang tersebut dirasa sudah tidak relevan lagi, oleh sebab itu kemudian disahkan revisi dan perubahannya menjadi Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang di dalamnya telah memuat mengenai penanaman modal asing maupun dalam negeri.

Namun meskipun demikian, dengan diaturnya bentuk penanaman modal di dalam Undang-Undang Penanaman Modal, bukan berarti semua jenis penanaman modal sudah sesuai dengan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah. Saat ini semakin berkembang jenis-jenis investasi yang marak disebut dengan “Investasi Bodong” oleh masyarakat awam, salah satunya adalah jenis investasi dengan metode *ponzi*.

Konsep investasi ini pertama kali dikembangkan oleh Charles Ponzi di Amerika pada tahun 1919. Di dalam konsep bisnisnya, ponzi menjanjikan keuntungan fantastis yang bahkan dapat berlipat ganda

²Dhaniswara K. Harjono, **Hukum Penanaman Modal**, Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta, hlm. 10.

berkali-kali lipat dari jumlah modal yang disetorkan kepadanya. Bahkan para *Investee* menjanjikan adanya keuntungan sebesar 50% dalam 45 hari atau 100% dalam 90 hari sudah menjadi cara yang ampuh guna menarik minat para investor.³

Hal tersebut ternyata kemudian menginspirasi masyarakat di seluruh dunia dan tidak terkecuali masyarakat Indonesia yang ingin dengan cepat mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar tanpa harus kerja keras untuk ikut melakukan bisnis skema *ponzi* tersebut. Padahal nyatanya Charles Ponzo sendiri telah dinyatakan oleh pengadilan di Amerika Serikat telah bersalah atas konsep *ponzi* tersebut dan telah mengakibatkan kerugian jutaan dollar amerika terhadap para investornya, sehingga hal ini tentu membuktikan bahwa bisnis skema *ponzi* ini merupakan bisnis ilegal.

Di dalam Undang-Undang Penanaman Modal memang masih belum menyebutkan mengenai larangan bisnis skema *ponzi* tersebut. Adapun di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 9 yang mengatur mengenai larangan skema piramida yang sering disamakan dengan *ponzi* berbunyi:

“Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.”⁴

Meskipun telah disebut sebagai sistem skema piramida di dalam Undang-Undang Perdagangan, namun nyatanya hal tersebut belum

³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5925388dbec70/skema-ponzi--jerat-penipuan-investasi-dengan-korban-bernilai-triliunan>, diakses pada tanggal 29 September 2017.

⁴Pasal 9 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

sepenuhnya menggambarkan mengenai bisnis skema *ponzi* secara spesifik. Hal ini tentu dapat menggambarkan adanya kekaburan hukum, pada nyatanya skema *ponzi* berbeda dengan skema piramida yang cenderung lebih dianggap mirip dengan skema MLM yang pada prakteknya berbeda dengan bisnis skema *ponzi*.

Ciri khas *ponzi* adalah orang-orang yang terlebih dahulu bergabung mendapatkan uang bukan dari bisnis atau investasi yang sah, melainkan mendapatkan komisi karena berhasil merekrut anggota baru. Skema *ponzi* yang terkadang disamakan dengan MLM dicirikan dengan sedikit atau tidak ada produk atau jasa yang dijual. Para anggota di awal biasanya mendapatkan komisi yang berasal dari biaya yang dibayar oleh anggota yang bergabung kemudian. Skema ini kemudian akan menyebabkan masalah karena untuk tetap mendapatkan komisi, seorang anggota harus tetap merekrut anggota baru, sedangkan bisnis skema MLM mendapatkan komisi atas penjualan produk atau jasa yang dilakukan secara individu ataupun tim.⁵

Hal ini tentu mengakibatkan hak-hak para investor juga sangat rawan tidak terpenuhi, apalagi ketika pihak tempat mereka menanamkan modalnya mengalami kerugian atau justru melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut belum diatur secara jelas dan spesifik di dalam perundang-undangan Indonesia pada saat ini, sehingga kedepannya perlu

⁵<https://www.biutiva.com/956/apa-itu-skema-piramida-ponzi-apa-mlm-masuk-didalamnya>, diakses pada 30 September 2017.

diatur mengenai hak-hak investor maupun perlindungan hukum kepada para investor apabila mereka mengalami kerugian akibat bisnis dengan skema *ponzi* ini.

Bisnis yang menggunakan skema *ponzi* ini sudah sejak lama dikategorikan sebagai bisnis yang terlarang atau ilegal, namun pada prakteknya masyarakat khususnya para investor tidak mengetahui bahwa *investee* atau perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya ternyata menjalankan skema *ponzi* secara diam-diam. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah permasalahan karena kerugian yang dihasilkan dari bisnis ini dapat sangat besar dan merugikan para investornya.

Adapun bisnis dengan skema MLM (*Multi Level Marketing*) yang seringkali disamakan dengan *ponzi* ternyata memiliki perbedaan yang signifikan dan bahkan ada bisnis dengan skema MLM yang secara legal terdaftar dan sah untuk dijalankan di Indonesia, diantaranya adalah JAFRA yang merupakan perusahaan network marketing yang telah tergabung dalam APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) sehingga operasi usahanya dianggap resmi dan legal di Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1956 dan telah beroperasi di banyak negara sebelum memasuki pasar Indonesia pada tahun 2013. JAFRA sendiri adalah perusahaan kosmetik internasional yang tergabung dalam Vorwerk, sebuah

perusahaan internasional dari Jerman yang menangani bidang penjualan langsung dan masuk dalam peringkat 5 besar dunia.⁶

Selain MLM, adapula skema piramida yang seringkali disamakan dengan *ponzi*. Namun, pada prakteknya terdapat perbedaan kecil yang terkadang menyalur dan membingungkan, yaitu apabila di dalam skema *ponzi* tidak ada barang yang diperjual belikan, hanya ada janji-janji mendapatkan keuntungan berlipat ganda setiap bulannya. Sedangkan dalam skema piramida, ada barang yang digunakan sebagai alat jual beli untuk menyamakan perputaran uang di dalam skema ini. Namun, barang yang diperjual belikan biasanya adalah barang-barang yang tidak terlalu begitu penting atau bahkan tidak memiliki nilai jual yang layak dan sulit untuk diperjual belikan apabila dijual dengan cara normal.⁷

Meskipun aturan mengenai skema piramida telah disebutkan di dalam Undang-Undang Perdagangan, namun hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat *Investee* skema *ponzi* dan melindungi para investornya, karena sudah jelas ada perbedaan diantara kedua skema ini, hal tersebut menyebabkan adanya kekaburan hukum di Indonesia dan berpotensi menyebabkan ketidak jelasan dan kerugian lainnya di kemudian hari apabila skema *ponzi* ini tidak segera diatur secara jelas mengenai regulasinya.

⁶*Ibid.*,

⁷<https://howmoneyindonesia.com/2015/06/01/perbedaan-ponzi-dan-skema-piramida-pyramid-scheme/>, diakses pada 12 November 2017.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian mengenai bagaimana seharusnya perlindungan ataupun payung hukum bagi para investor di dalam bisnis skema *ponzi* ini. Hal ini merupakan masalah yang sangat urgenitas, mengingat pada saat ini semakin marak bisnis-bisnis dengan menggunakan konsep *ponzi* tanpa diketahui oleh para investornya bahwa *Investee* nya melakukan bisnis dengan skema demikian.

Kasus terbaru dari bisnis skema *ponzi* ini adalah kasus First Travel, yang diduga di dalam menjalankan bisnisnya menggunakan skema *ponzi*, dimana terdapat ribuan jama'ah umrah yang hingga kini tidak diberangkatkan, padahal mereka telah menyetorkan uang yang totalnya ditaksir hingga Rp. 800 milyar lebih, dan kini pemilik First Travel telah dinyatakan sebagai tersangka atas bisnis yang diduga dijalankan dengan skema *ponzi* ini, dan perlindungan hukum terhadap para investor maupun jama'ahnya juga masih belum jelas. Selain itu, di Indonesia juga semakin bermunculan bisnis-bisnis serupa yang semakin sulit dibedakan legalitasnya, semisal kasus investasi Koperasi Pandawa Group, dan Wedding Organizer yang pada pelaksanaan bisnisnya diduga menggunakan skema *ponzi* untuk memberikan keuntungan bagi para investornya. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA BISNIS SKEMA *PONZI* DI INDONESIA.**

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	RIZKY ARISANDI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015	KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN INVESTASI ILLEGAL DI TASIKMALAYA	1. Apakah peran & tugas Otoritas Jasa Keuangan mencakup penanganan Investasi ilegal yang melakukan penghimpunan dana masyarakat 2. Mengapa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk investasi ilegal pada putusan MA 196/K/PID.SUS/2013 berjalan lancar tanpa adanya izin dari Otoritas Jasa Keuangan	Skripsi ini membahas mengenai peranan OJK dalam pengawasan dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap seluruh investasi ilegal di kota Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif
2.	WISELY Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2015	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK <i>MONEY GAME</i> DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN BERBASIS <i>MULTI LEVEL MARKETING</i>	1. Bagaimanakah legalitas perdagangan <i>Multi Level Marketing</i> di Indonesia 2. Bagaimanakah legalitas praktik perdagangan <i>Money Game</i> berbasis <i>Multi</i>	Skripsi ini membahas mengenai legalitas perdagangan berbasis <i>MLM</i> yang berkaitan dengan <i>Money Game</i> dan penegakan hukumnya di

			<i>Level Marketing</i> di Indonesia 3. Bagaimanakah penegakan hukum positif dalam upaya menanggulangi praktik <i>Money</i> <i>Game</i>	Indonesia Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
--	--	--	--	--

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang dapat ditarik berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para investor dalam bisnis dengan skema *ponzi* di Indonesia?
2. Bagaimana peranan OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada para investor dalam bisnis skema *ponzi*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum terhadap para investor di dalam skema *ponzi*.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai peranan OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada para investor dalam bisnis skema *ponzi*

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan penelitian di atas, maka dapat ditentukan manfaat dari penulisan penelitian ini. Manfaat penulisan ini dibagi menjadi dua (2) yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan sumber tinjauan untuk ilmu hukum khususnya terkait hukum perdata bisnis.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi akademis maupun kaum intelektual sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti lainnya yang hendak melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap investor *ponzi* di Indonesia.

b. Manfaat Praktik

a. Bagi Investor

Manfaat penulisan penelitian ini bagi pihak investor adalah agar mereka dapat diberikan perlindungan hukum yang sesuai apabila mengalami kerugian ataupun merasa tertipu dengan hadirnya bisnis *ponzi*. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat turut meningkatkan kehati-hatian masyarakat yang ingin menjadi investor dalam suatu bisnis

tertentu agar lebih memahami bidang bisnis *investee* mereka dan tidak terjebak dengan bisnis skema *ponzi*

b. Bagi Investee

Manfaat dari penulisan penelitian ini bagi pihak *investee* agar mereka tidak lagi menjalankan bisnis serupa dengan skema *ponzi* karena tidak hanya dapat merugikan mereka, namun para investor dengan skala yang sangat besar.

c. Bagi Pemerintah

Manfaat dari penulisan penelitian ini bagi pihak pemerintah adalah agar dapat membuat suatu aturan khusus dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah terkait legalitas *ponzi* di Indonesia dan memberikan kejelasan terkait perlindungan hukum terhadap investor yang menanamkan modalnya di bisnis dengan skema tersebut.

d. Bagi Mahasiswa

Manfaat penulisan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum perdata bisnis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi, bacaan maupun ilmu tambahan di kalangan mahasiswa terutama mengenai skema *ponzi* dan perlindungan hukum terhadap para investornya.

e. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangsih wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai skema *ponzi* dan perlindungan hukum terhadap investor yang menanamkan dananya di dalam bisnis skema tersebut, agar kedepannya masyarakat luas dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas berinvestasi guna menghindari *investee* yang menjalankan skema *ponzi*, termasuk apabila mereka menjadi korban dan dirugikan atas bisnis tersebut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut penafsiran gramatikal (tata bahasa) dibagi menjadi dua suku kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Adapun pengertian kata perlindungan menurut KBBI adalah “tempat berlindung, hal (perbuatan dsb) melindungi”⁸.

Sedangkan pengertian hukum adalah:

“peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; kepuasan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh haki (di pengadilan); vonis.”⁹

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku yang berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.¹⁰

⁸W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) <http://kamusbahasaIndonesia.org/perlindungan>, diakses pada 30 Oktober 2017.

⁹*Ibid.*,

¹⁰Chainur Arrasjid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, 2000, Medan, hlm. 21.

Oleh sebab itu hukum sangat berperan penting guna memberikan perlindungan kepada para investor di dalam bisnis skema *ponzi* agar mereka terhindar dari kepentingan-kepentingan para pihak lain yang ingin merugikan atau melakukan penipuan kepada mereka.

Menurut pandangan beberapa ahli di bidang hukum, definisi mengenai perlindungan hukum diantaranya adalah:

1. Philipus Hadjon

Menurut beliau, perlindungan hukum dimaksudkan untuk melindungi harkat dan martabat rakyat sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Philipus Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan hukum represif yaitu dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum pada keadaan sebenarnya. Perlindungan ini biasanya dilakukan di pengadilan.
- b. Perlindungan hukum preventif yaitu dengan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum pemerintah menerapkan suatu peraturan, rakyat dapat mengajukan

keberatan atau diminta pendapatnya mengenai keputusan tersebut.¹¹

2. Satjipto Rahadjo

Menurut beliau, perlindungan hukum adalah adanya tindakan atau upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri.¹²

3. Muchsin

Menurut beliau, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹³

B. Kajian Tentang Hukum Investasi

1. Pengertian Hukum Investasi

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan mengenai pengertian investasi secara spesifik, sehingga untuk mengetahui

¹¹Philipus Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, 1987, Surabaya, hlm. 2.

¹²Satjipto Rahadjo, **Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia**, Kompas, 2003, Jakarta, hlm. 121.

¹³Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia**, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Surakarta, hlm. 14.

definisi dari investasi perlu mencari dari pendapat para ahli maupun kamus hukum.¹⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. Mengemukakan pengertian hukum investasi. Hukum investasi adalah:

“norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.”

Dalam definisi tersebut, hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum. Norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya.¹⁵

- a. Penanaman investasi;
- b. Syarat-syarat investasi;
- c. Perlindungan; dan
- d. Kesejahteraan bagi masyarakat.

Setiap usaha penanaman investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan rakyat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat. Dari uraian tersebut maka dapat dikemukakan bahwa hukum investasi memiliki unsur-unsur:¹⁶

- a. Adanya kaidah hukum;
- b. Adanya subjek, di mana subjek dalam hukum investasi adalah investor dan negara penerima investasi;

¹⁴*Ibid.*, hlm. 9.

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hlm. 11.

- c. Adanya bidang usaha yang diperkenankan untuk investasi;
- d. Prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi; dan
- e. Negara.

Secara umum dapat dikatakan bahwa investasi atau penanaman modal adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) sebagai upaya dalam meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.¹⁷

2. Jenis-Jenis Investasi

a. Investasi Berdasarkan Bentuk

1) Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Dalam konteks ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Pengertian investasi secara langsung ini seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal.¹⁸

Investasi langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal,

¹⁷Ana Rokhmatussa'dyah, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, 2009, Malang, hlm. 3.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 4.

dengan melakukan kerja sama operasi (*joint venture scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*), dengan memberikan lisensi, dan lain-lain.¹⁹

2) Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*) atau Portofolio Investment

Investasi ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Kegiatan investasi secara tidak langsung disebut demikian karena pada umumnya dilakukan kegiatan jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.²⁰

b. Investasi Berdasarkan Aset

1) *Real Asset*, yaitu Investasi dalam bentuk aktiva berwujud fisik.

Contoh: Emas, Batu Mulia, Gedung, Kendaraan, dan sebagainya.²¹

2) *Financial Asset*, yaitu Investasi berupa dokumen (surat-surat)

klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap sebuah aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.²²

¹⁹*Ibid.*, hlm. 5.

²⁰*Ibid.*,

²¹*Ibid.*, hlm. 7.

²²*Ibid.*,

c. Investasi Berdasarkan Pengaruh

1) **Investasi *Autonomus***, yaitu Investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan dan bersifat spekulatif. Sebagai contoh: pembelian surat-surat berharga.²³

2) **Investasi *Induced***, yaitu Investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa dan dalam tingkat pendapatan. Sebagai contoh: penghasilan transitori yakni suatu penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja, seperti bunga dan lain sebagainya.²⁴

d. Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaan²⁵

1) **Investasi Bersumber Modal Asing**

2) **Investasi Bersumber Modal Dalam Negeri**

C. Kajian Umum Tentang Investor

Investor adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki dan menggunakan dananya untuk melakukan suatu tindakan investasi atau penanaman modal. Di dalam menjalankan kegiatan investasinya, para investor dapat

²³*Ibid.*, hlm. 8.

²⁴*Ibid.*,

²⁵*Ibid.*, hlm. 9.

melakukan dengan beberapa pilihan investasi sesuai dengan jenis-jenis investasi yang tersedia.

Di dalam dunia investasi, modal dari investor merupakan komponen penting guna mendorong terjadinya transaksi di dalamnya. Secara umum para investor yang memberikan dana investasinya di dalam dunia pasar modal dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut.²⁶

- a) Berdasarkan jenis pelakunya, yaitu pemodal perorangan dan institusi/badan;
- b) Berdasarkan kewarganegaraannya, yaitu pemodal domestik dan asing;
- c) Berdasarkan perolehan sahamnya, yaitu pemodal pendiri dan bukan pendiri;
- d) Berdasarkan motivasi dan jangka waktu pemilikan, yaitu pemodal jangka panjang dan jangka pendek;
- e) Berdasarkan karakteristiknya, yaitu pemodal aktif dan pasif.

Investor dalam kategori perorangan adalah investor individual yang melakukan aktifitas investasi untuk dirinya sendiri dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Investor ini memiliki keterbatasan dalam hal informasi dan tidak memiliki analisis yang mendalam mengenai pemilihan pengambilan keputusan

²⁶Agus Kretarto, *Investor Relation: Pemasaran dan Komunikasi Keuangan Berbasis Kepatuhan*, Jakarta: Grafiti Pers, 2001, hlm. 2.

investasi, karena hanya mengandalkan naluri ataupun informasi yang didapatkan dari secara umum.²⁷

Sedangkan investor institusi atau badan adalah pihak dengan jumlah dana yang besar guna melakukan aktifitas invetasi, misalnya reksadana, perusahaan efek dan dana pensiun, dimana pihak-pihak tersebut di dalam melakukan aktifitas investasinya tidak terlalu diatur oleh regulasi yang ada.²⁸ Investor dalam kategori inilah yang diharapkan dapat memanfaatkan dunia pasar modal sebagai media investasi.²⁹

Investor individual maupun institusi kemudian dikelompokkan lagi menjadi investor domestik dan investor asing. Investor domestik sendiri adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang melakukan aktifitas investasi dengan meletakkan modalnya pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.³⁰

Sedangkan investor asing adalah warga negara asing baik secara perorangan atau badan usaha asing yang turun melakukan aktifitas berinvestasi melalui pasar modal yang ada di Indonesia.

Kemudian, penggolongan investor juga dibagi berdasarkan jangka waktu investor tersebut melakukan investasinya, dimana investor tersebut dibagi kedalam investor jangka panjang (*long term investor*) dan investor jangka pendek

²⁷Imam Sjahputra Tunggal, **Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia**, Jakarta, Havarindo, hlm. 14-15.

²⁸*Ibid.*, hlm. 16.

²⁹*Ibid.*,

³⁰*Ibid.*, hlm. 17.

(*short term investor*) yang keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan, yaitu.³¹

a) *Long Term Investor*

Kelebihan dari investor ini adalah:

1. Secara umum investor dengan *long term investor* akan menikmati *gain* yang lebih besar dibandingkan para *trader*;
2. Akan mendapatkan presentasi pengembalian dana investasi dibandingkan *trader*;
3. Tidak akan mengalami tekanan yang besar dalam mengamati pergerakan saham sehingga secara psikologis tidak terlalu terbebani;
4. Tidak terbebani *fee* perdagangan.

Kekurangan dari investor ini adalah:

1. Dapat memiliki *return* yang lebih rendah dalam jangka pendek;
2. Akan sangat tergantung dari performa portofolio dan karena tidak selalu mengikuti perkembangan pasar, investor ini akan ketinggalan informasi mengenai aktifitas bursa.

b) *Short Term Investor*

Kelebihan dari investor ini adalah:

³¹Tim Studi Riil Investor di Pasar Modal Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 11.

1. Jika berhasil, maka investor dapat menghasilkan *gain* lebih besar dibandingkan dengan investasi pada instrumen lain;
2. Selalu ada kesempatan untuk dapat menghasilkan uang setiap waktu;

Kekurangan dari investor ini adalah:

1. Selalu membayar *broker fee* setiap kali melakukan transaksi;
2. Harus selalu memantau aktifitas pasar dan harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi sewaktu-waktu termasuk mengalami kerugian besar.

D. Kajian Umum Tentang Bisnis

1. Pengertian Bisnis

Pengertian bisnis adalah kegiatan atau bentuk aktivitas penjualan jasa dan barang yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh keuntungan kepada pihak yang berusaha dan berlangsung secara terus menerus selama masih memberikan keuntungan.³² Ada beberapa pandangan dari para ahli mengenai pengertian bisnis, yang diantaranya adalah:³³

a. Peterson dan Plowman

Menurut mereka, bisnis adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penjualan ataupun pembelian barang dan jasa

³²Zaeni Asyhadie, **Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 2.

³³*Ibid.*,

yang secara konsisten terus menerus dilakukan (*a series of activities related to the sale or purchase of goods and services that are consistently repeated*).

b. Prof. L. R. Dicksee

Menurut beliau, bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan ataupun yang berkepentingan di dalam terjadinya aktivitas tersebut.

2. Tujuan Bisnis

Setiap bisnis maupun usaha yang dijalankan tentu saja selalu berusaha untuk mengolah bahan untuk dijadikan produk yang dibutuhkan oleh para konsumen, produk yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk barang ataupun jasa. Tujuan perusahaan membuat produk adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya.

Pada umumnya tujuan didirikannya bisnis atau usaha tidak hanya sebatas *profit oriented* semata, namun secara keseluruhan tujuan didirikannya bisnis adalah meliputi:³⁴

- 1) Profit;
- 2) Pengadaan barang atau jasa;
- 3) Kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat;
- 4) Full employment;
- 5) Eksistensi perusahaan dalam jangka panjang;

³⁴*Ibid.*, hlm. 3.

- 6) Kemajuan atau pertumbuhan usaha;
- 7) Prestise atau prestasi.

E. Kajian Umum Tentang Ponzi

Skema bisnis *Ponzi* diambil dari nama Charles Ponzi (3 Maret 1882-18 Januari 1949), Ponzi adalah seorang Italia yang tinggal di Boston, AS. Ponzi juga terkenal karena kasus penipuannya yang menawarkan sebuah skema bisnis investasi dengan keuntungan di atas 50% hanya dalam waktu 45 hari atau bahkan hingga 100% dalam kurun waktu 90 hari. Sistem yang ditawarkan oleh Ponzi ini merupakan sistem piramida yang banyak digunakan untuk melakukan penipuan dalam money game. Sekilas skema *Ponzi* ini memang mirip dengan skema MLM.

Bisnis yang ditawarkan oleh Charles Ponzi memang merupakan suatu skema bisnis yang sangat menggiurkan, terlebih lagi pada era saat itu dimana untuk mendapatkan keuntungan dengan jumlah sebesar itu sangat sulit untuk dilakukan, namun pada kenyataannya jauh dari logika investasi di pasar modal, asuransi, deposito, bahkan investasi dalam bentuk bisnis riil semisal properti ataupun emas. Skema penipuan ini sering digunakan di dalam masyarakat dengan adanya iming-iming keuntungan yang besar, keuntungan tersebut akan dibayar dengan dana yang masuk dari anggota baru dan bukan dari investasi riil, sehingga investor dari bisnis ini harus selalu giat untuk mencari anggota ataupun investor-

investor baru agar modal yang mereka berikan dapat terus berputar dan menghasilkan keuntungan.³⁵

Diantara bisnis dengan skema *Ponzi* dengan skema MLM sebenarnya hampir serupa, namun setidaknya ada tiga (3) ciri mendasar yang membedakan antar kedua skema investasi tersebut, diantaranya adalah.³⁶

1. Biaya Pendaftaran, Bisnis MLM tidak menghasilkan bonus dari biaya pendaftaran, sebaliknya pada bisnis investasi dengan skema *Ponzi*, biaya pendaftaran digunakan untuk membayarkan bonus.
2. Jenis Produk, Pada bisnis MLM ada produk yang dijual dan memiliki legalitas, produk yang dijual juga memiliki kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan serta ada jaminan pembelian kembali (*buyback guarantee*) bagi distributor yang berhenti, sedangkan pada *Ponzi* tidak ada bentuk nyata dari produk yang ditawarkan, hanya berupa janji keuntungan yang berlipat ganda, tidak ada produk yang dijual. Kalaupun ada hanya sebagai kedok dan kualitasnya dipertanyakan, selain itu tidak ada jaminan pembelian kembali bagi distributor yang berhenti.
3. Bonus Yang Dijanjikan, Di bisnis MLM bonus yang diperoleh anggota berasal dari penjualan produk sementara di skema *Ponzi* anggota memperoleh bonus jika merekrut anggota baru.

³⁵Info APLI Edisi XXVII Januari-Maret 2005, 10-11

³⁶<http://infobanknews.com/memahami-skema-ponzi-dan-bedanya-dengan-mlm/2/>, diakses pada 29 Oktober 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang tidak sama sekali keliru (*true asnwer*) dan/atau jawaban yang benar (*right answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.³⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik data primer maupun sekunder.³⁸

Adapaun di dalam penelitian ini maka peneliti melakukan studi-studi kepustakaan terkait Perundang-Undangan yang terkait dengan perlindungan hukum dan hukum investasi, maupun studi terhadap

³⁷Zainuddin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Palu, hlm. 18.

³⁸Dyah Ochtorina Susanti, **Penelitian Hukum (*Legal Research*)**, Sinar Grafika, hlm. 19.

literatur-literatur terkait, guna menemukan solusi mengenai kekaburan hukum yang terjadi terhadap perlindungan hukum terhadap investor pada bisnis skema *Ponzi*.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan menurut Peter Marzuki adalah:

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.”

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif ini memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis., pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.

Dalam hal ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan beberapa Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah terkait.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Dengan menggunakan pendekatan konseptual, maka peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan di dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum maupun doktrin hukum yang dikemukakan. Hal tersebut dilakukan dikarenakan belum ditemukannya hukum terhadap permasalahan hukum yang terjadi, terutama mengenai konsep investasi dan bisnis skema *ponzi*, sehingga pandangan para ahli hukum maupun doktrin tersebut sangat penting guna menghasilkan argumentasi hukum demi tercapainya penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dirumuskan dan disahkan oleh pemerintah yang kemudian dijalankan sebagai sebuah peraturan.³⁹

Di dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu sama lain dengan permasalahan yang diangkat yaitu

³⁹Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

mengenai perlindungan hukum bagi investor di dalam bisnis skema *Ponzi*, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah bahan hukum terkait yang merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang dimaksud dapat berupa buku-buku teks hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para ahli (doktrin) yang terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dalam penelitian ini guna mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini yang didapatkan dari:

- a. Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- c. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

2. Akses Internet

Selain menggunakan studi kepustakaan, bahan hukum di dalam penelitian ini juga diperoleh dari akses situs-situs website yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai substansinya dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sehingga dapat menunjang bahan-bahan hukum penelitian ini.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Di dalam penelitian yuridis normatif, tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data lapangan tersebut, sehingga bahan hukum di dalam penelitian yuridis normatif, pengolahan data harus dikumpulkan secara sistematis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁴⁰

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹ Kegiatan yang dilakukan di dalam teknik analisis tersebut diantaranya adalah:

1. Mengumpulkan seluruh bahan hukum yang digunakan, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Di dalam bahan hukum primer, analisis yang dilakukan adalah menelaah dan menggunakan pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder, analisis

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 29.

yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan hukum dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, ensiklopedia hukum, kamus-kamus hukum maupun doktrin para ahli.

2. Mengolah dan mengidentifikasi bahan hukum yang telah dikumpulkan.

a. Pada bahan primer, penulis menggunakan analisis terhadap Undang-Undang terkait yang bersangkutan dengan perlindungan hukum terhadap investor pada bisnis skema *Ponzi* di Indonesia.

b. Pada bahan sekunder, penulis menggunakan teknik analisis terhadap sumber-sumber buku, jurnal, kamus, maupun ensiklopedia dan doktrin hukum sehingga dapat menjadi penunjang bagi penelitian terhadap sumber hukum primer.

3. Melakukan penafsiran dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis.

a. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran dengan merujuk pada hal-hal yang sesuai dengan tata bahasa.⁴² Dalam hal ini objek yang akan

⁴²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Gramatikal (online), <https://kbbi.web.id/gramatikal>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2017.

ditafsirkan adalah peraturan perundang-undangan terkait.

- b. Penafsiran sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, sehingga kita dapat mengerti tentang apa yang dimaksud.⁴³

F. Definisi Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat rakyat sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, dalam hal ini perlindungan hukum yang akan diberikan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap investor pada skema *Ponzi*.
2. Investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi,

⁴³R. Soeharso, 1992, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 102.

syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

3. Investor adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki dan menggunakan dananya untuk melakukan suatu tindakan investasi atau penanaman modal. Di dalam menjalankan kegiatan investasinya, para investor dapat melakukan dengan beberapa pilihan investasi, yang diantaranya adalah *fixed asset*, investasi langsung, ataupun investasi dalam dunia pasar modal (keuangan). Investor yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah investor pada skema *Ponzi*.
4. Bisnis adalah kegiatan atau bentuk aktivitas penjualan jasa dan barang yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh keuntungan kepada pihak yang berusaha dan berlangsung secara terus menerus selama masih memberikan keuntungan, khususnya bisnis-bisnis yang menggunakan skema *Ponzi* dalam kegiatannya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I berisi latar belakang sebagai dasar acuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tabel penelitian terdahulu yang

memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan sekaligus sebagai pembanding, pokok permasalahan yang dibahas, tujuan penelitian yang ingin dicapai, dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis bagi para pihak-pihak terkait.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

BAB II berisi mengenai kajian-kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, membahas kajian ilmiah yang dihubungkan dengan pendapat para ahli mengenai permasalahan tersebut guna mencapai pemahaman konseptual dengan baik. Kajian pustaka di dalam penelitian ini berkaitan dengan perlidungan hukum, investasi, investor, bisnis, dan skema *Ponzi*.

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB III berisi tentang metode atau cara peneliti melakukan penelitian ini, baik dari jenis, pendekatan, sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, definisi konseptual maupun sistematika penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara yuridis normatif. Menurut uraian tentang metode pendekatan, jenis sumber bahan hukum, metode perolehan bahan hukum, data primer, data sekunder serta metode analisis yang digunakan di dalam penulisan penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV berisikan mengenai uraian dan rincian serta hasil yang ingin dicapai secara detail dan kritis. Permasalahan yang akan dibahas dan dicari penyelesaiannya akan dibahas ke dalam sub bab yang berbeda. Di dalam hasil dan pembahasan ini nantinya akan ada beberapa rumusan masalah yang akan turut diuraikan dan dijelaskan ke dalam bab IV ini dan dibagi kedalam kelompok sub bab agar penjelasan mengenai penelitian ini dapat lebih jelas dan rinci serta agar hasil dari penelitian ini dapat tersampaikan dengan baik.

BAB V: PENUTUP

BAB V merupakan bab paling terakhir di dalam penulisan penelitian ini yang di dalamnya berisi kesimpulan serta saran dari permasalahan yang dibahas. Kesimpulan sendiri merupakan ringkasan mengenai rumusan masalah yang telah diuraikan di dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan penyampaian dari penulis terkait permasalahan tersebut agar kedepannya dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema *Ponzi* di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan, telah dirumuskan mengenai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan investasi, sehingga dapat terhindar dari jenis-jenis investasi ilegal yang salah satunya adalah investasi dengan bisnis skema *Ponzi*. Namun sebelum menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap investor pada bisnis skema *Ponzi*, maka terlebih dulu penulis akan menjelaskan mengenai perbedaan antara Multi Level Marketing (MLM), Piramida dan *Ponzi*, yang seringkali sulit dibedakan karena skemanya yang hampir sama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku salah satu lembaga yang mengawasi aktifitas keuangan di Indonesia mencatat bahwa telah banyak laporan yang masuk mengenai penanaman modal atau investasi yang ditawarkan yang sebagian besar setelah diselidiki oleh OJK bukan merupakan kewenangan dari OJK. Laporan yang masuk tersebut sebagian besar adalah dugaan investasi fiktif yang ditawarkan baik dalam bentuk perusahaan maupun produk.

Dari jumlah tersebut, pengaduan masyarakat terdiri dari investasi uang, investasi valuta asing, investasi *online*, investasi emas, *promissory note*, investasi pakaian, investasi saham luar negeri, investasi pulsa, investasi produk pertanian, tanaman, dan perkebunan, investasi produk peralatan elektronik, tabungan investasi profesi syariah (TIPS), investasi berjangka komoditi, investasi penanaman modal usaha, investasi *tour and travel*, investasi alat kesehatan, investasi ayam petelur, investasi penyewaan dan penjualan properti, investasi properti rumah atau tanah, investasi di sektor riil dan ekspor impor, investasi perhotelan, investasi kendaraan, dan investasi tabungan haji. Sedangkan, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa fungsi OJK adalah:⁴⁴

“menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Selain itu di dalam Pasal 6 menjelaskan mengenai tugas dari OJK yang diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

⁴⁴Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁴⁵Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tugas dan fungsi dari OJK tersebut, maka dalam hal ini OJK tidak berwenang atau tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut, karena sebagian besar perusahaan tersebut bukanlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), sehingga tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Peningkatan laporan investasi fiktif ini diakibatkan karena beberapa faktor yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan, khususnya pemahaman masyarakat mengenai investasi yang legal dan ilegal serta diperburuk dengan kondisi masyarakat yang mengharapkan *return* tinggi dengan mengabaikan segala resiko yang mungkin didapat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pelapor yang tidak hanya berasal dari kalangan menengah ke bawah saja, tetapi juga berasal dari masyarakat kelas atas yang dapat dikategorikan berpendidikan atau *well educated*.⁴⁶ Terdapat dua kategori masyarakat yang menjadi target perusahaan investasi fiktif, yaitu masyarakat yang tidak tahu bahwa perusahaan atau produk-produk investasi yang ditawarkan itu tidak memiliki izin, dan masyarakat yang sudah memahami izin perusahaan tersebut, namun masih tetap mengharapkan *return* yang tinggi, yang salah satunya adalah bisnis skema *Ponzi*.⁴⁷

Skema *Ponzi* sangat mirip dan menyerupai skema piramida dan MLM yang di dalam hukum Indonesia skema MLM ini sudah diakui dan

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 5

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 6

ada beberapa skema MLM yang dilegalkan, berbeda dengan skema piramida yang sudah jelas diatur dan dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, sedangkan skema *Ponzi* belum diatur secara jelas dalam hukum Indonesia, namun telah diakui sebagai bentuk skema investasi ilegal di negara lain.

1. Perbedaan Skema *Ponzi*, Piramida dan MLM

a. *Ponzi*

Skema *Ponzi* di Indonesia secara regulasi belum memiliki Undang-Undang khusus dan juga belum disebutkan di dalam Undang-Undang yang terkait, seperti misalnya di dalam Undang-Undang Perdagangan, padahal skema seperti ini sudah sangat sering digunakan di dalam dunia bisnis investasi di Indonesia, dan sudah banyak korban yang mengalami kerugian dari skema *Ponzi* ini. Pada bisnis dengan skema *Ponzi*, kegiatan mengumpulkan dana masyarakat dengan sebuah janji bahwa *return* atau keuntungan yang akan didapatkan akan sangat besar, jauh melebihi kegiatan investasi normal dalam waktu yang relatif singkat. Bisnis skema ini biasanya dijalankan dengan merekrut member atau investor baru sehingga akan ada uang yang tetap mengalir masuk ke dalam perusahaan atau *investee* bisnis ini. Uang investor tersebut tidak dipergunakan untuk sebuah bisnis tertentu, melainkan menjadi

modal untuk membayar investor yang telah berinvestasi terlebih dahulu.⁴⁸

Ponzi adalah sebuah skema bisnis menarik dana dari investor A untuk membayar investor B dan begitu selanjutnya. Dana tersebut tidak digunakan ke dala bisnis untuk mendapatkan keuntungan, skema bisnis ini akan mulai hancur ketika tidak ada lagi investor yang masuk dan menyetorkan dananya kepada *investee*.

Investasi skema *Ponzi* dapat dikatakan bahwa *investee* harus tetap mencari investor baru untuk menutup dana yang harus dibayarkan kepada investor sebelumnya, misalnya dana investasi dari B dan C digunakan untuk membayar modal A beserta keuntungannya, kemudian investasi dari D, E, dan F digunakan untuk membayar dana B dan C beserta keuntungannya juga, begitu seterusnya. Dari waktu ke waktu skema ini akan membuat “lubang” yang digali harus lebih besar dengan hutang yang lebih besar pula, hal ini diakibatkan karena kewajiban untuk membayarkan keuntungan dari investor sebelumnya.⁴⁹

Bisnis skema *Ponzi* ini pada akhirnya akan terjadi masalah ketika sang *investee* kesulitan untuk mencari investor baru untuk

⁴⁸<https://howmoneyindonesia.com/2015/06/01/perbedaan-ponzi-dan-skema-piramida-pyramid-scheme/>, diakses pada 15 Februari 2018.

⁴⁹*Ibid.*,

menutupi keuntungan investor sebelumnya, saat terjadi masalah maka investor yang masuk terakhir yang akan sangat merasakan dampaknya karena dana yang dia setorkan tidak dapat kembali. Skema ini akan menimbulkan kerugian dengan skala yang besar, karena melibatkan banyak pihak di dalamnya, sedangkan investor yang mendapatkan keuntungan atau balik modal jumlahnya tidak sebanding dengan para investor yang merasakan kerugian akibat skema ini. Bahkan menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, dalam rentan waktu 2011 – 2016, dana yang dihimpun dari investasi skema *Ponzi* dapat mencapai 50 Trilyun.⁵⁰

Bisnis skema *Ponzi* memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali oleh para calon investor ketika mereka akan menanamkan modalnya pada suatu bisnis investasi, dan sudah seharusnya para investor menanamkan prinsip kehati-hatian dalam menanamkan modalnya. Ciri dari bisnis skema *Ponzi* ini adalah:⁵¹

- 1) Menawarkan Keuntungan Yang Besar Dalam Jangka Waktu Singkat**

Sebagai acuan, keuntungan yang ditawarkan beberapa jenis bisnis investasi yang diduga melakukan praktik skema *Ponzi* diantaranya arisan berantai Manusia Membantu Manusia (MMM) yang menawarkan

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹<http://bahasbisnis.com/2017/08/27/apa-itu-skema-ponzi-piramida-dan-money-game/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2018.

keuntungan sebesar 30% kepada anggotanya dalam waktu singkat yaitu hanya dalam waktu satu minggu saja. Padahal sewajarnya keuntungan dengan skala besar dengan prosentase yang tetap setiap bulannya tentu tidak akan jauh dari bunga deposito yang besarnya berkisar diantara 3% sampai 6% setiap bulannya.

Dalam bisnis dengan skala besar seperti ini tentu ada biaya lain yang harus dikeluarkan karena tentu ada pegawai yang harus digaji ataupun biaya operasional lainnya. Keuntungan yang ditawarkan kepada para investor juga dapat berupa pengurangan harga yang besar seperti halnya pada kasus umroh PT. First Travel.

2) Tidak Memiliki Legalitas Dari OJK

Sebelum para investor memilih *investee* untuk menanamkan modalnya, tentu aspek legalitas *investee* harus sangat diperhatikan. Namun, ciri ini tidaklah mutlak, beberapa perusahaan yang diduga menggunakan skema *Ponzi* dalam menjalankan bisnisnya ternyata memiliki legalitas dan izin dari lembaga terkait. Contohnya adalah PT. First Travel yang hanya mempunyai legalitas dari Kementerian

Agama, namun tidak terdaftar sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan di OJK, karena biro perjalanan bukan dibawah kewenangan OJK.

3) Jenis Usaha Yang Kompleks dan Sulit Dipahami

Ciri selanjutnya adalah para *investee* yang menggunakan skema *Ponzi* ini, biasanya memiliki jenis usaha yang sulit dipahami oleh masyarakat, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa bisnis tersebut menggunakan skema *Ponzi*. Terkadang jenis usaha yang dijalankan juga dirahasiakan dari para investornya, hal ini juga diakibatkan karena kurangnya peran aktif dari masyarakat untuk mengetahui jenis usaha tersebut, yang mereka pedulikan hanya besaran keuntungan yang mereka dapatkan tanpa peduli bagaimana proses keuntungan tersebut didapatkan.

b. Piramida

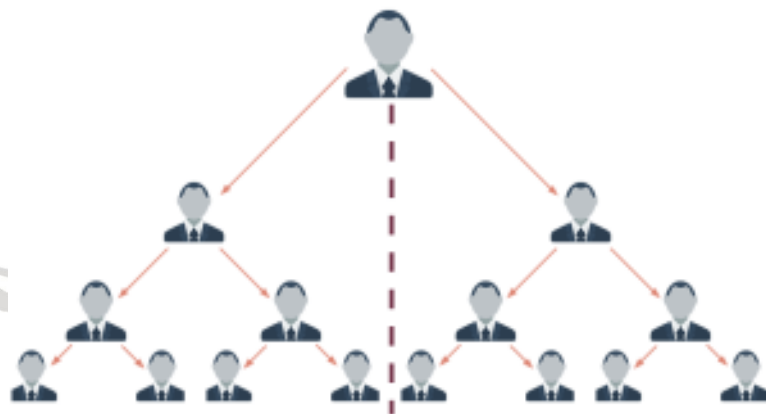
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, telah menyebutkan bahwa skema Piramida ini merupakan skema yang dilarang untuk diterapkan, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan :

“Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang”⁵²

Dan di dalam Penjelasan Pasal 9 tersebut dijelaskan bahwa:⁵³

“Yang dimaksud dengan skema piramida adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.”

Skema ini dinamakan piramida, karena bisnis investasi yang menggunakan skema ini mengandalkan pemasukan dari perekrutan anggota baru menggunakan sistem jaringan, dimana seorang anggota hanya bisa mempunyai susunan downline langsung dengan jumlah tertentu, misalnya 2 (binary) dan 3 (ternary). Apabila sistem jaringan ini terbentuk secara ideal maka akan membentuk susunan piramida..



Gambar 1.

⁵²Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

⁵³Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Bentuk Piramida Downline 2 (Binary)

Perbedaan utama dari skema piramida dengan *Ponzi* adalah pada skema piramida umumnya mengutamakan promosi-promosi kesuksesan apabila menjadi anggota atau agen mereka. Hal yang ditawarkan dalam bisnis dengan skema piramida ini adalah dalam bentuk penjualan produk-produk yang sebagian besar memiliki nilai jual yang kecil atau bahkan harganya di pasar sangat rendah, namun karena mendapatkan iming-iming kesuksesan maka para anggota atau agen tetap membelinya meskipun dengan harga tinggi tanpa memperhatikan kegunaan dari produk tersebut. Namun pada kenyataannya, tingkat kesuksesan dari skema seperti ini hanya sebagian kecil saja, dan hal inilah yang menjadi bahan promosi untuk merekrut orang agar mau menjadi agen atau anggota mereka.

Tingkat kerugian dari bisnis dengan skema piramida ini tidak sebesar dan seluas skema *Ponzi* karena apabila mereka tidak dapat merekrut anggota baru mereka masih dapat menggunakan produk yang mereka beli meskipun kegunaannya sangat kecil. Kasus dengan skema seperti ini biasanya berakhir tanpa ada gugatan ataupun laporan kepada pihak berwajib karena tingkat kerugian yang tidak terlalu besar.

Meskipun di dalam penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa skema piramida ini bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, namun pada kenyataannya skema ini sering disamakan

dengan menggunakan istilah komisi produk, setelah harga produk tersebut dinaikkan terlebih dahulu. Barang yang digunakan untuk penyamaran dalam bisnis skema ini dinaikkan harganya dan nantinya selisih antara harga normal dengan harga yang sudah dinaikkan tersebut yang akan digunakan untuk membayar anggota yang terlebih dahulu masuk dalam bisnis ini.

Pengguna skema piramida biasanya mengiming-imingi pembeli dengan potensi bisnis dan keuntungan yang besar, sehingga mereka masih tetap bisa menjual produk yang mahal meskipun sebenarnya tidak bernilai atau bernilai rendah. Dengan membeli produk tersebut, maka pembeli berhak menjadi agen atau anggota dengan keuntungan yang tinggi. Pada akhirnya sama dengan skema piramida yang disebutkan di dalam pasal 9 UU No, 7 Tahun 2014, skema piramida produk seperti ini juga hanya mencari agen-agen penjual saja.

Meskipun skema piramida seringkali disamarkan dengan memasarkan produk sehingga terlihat berbeda dengan skema piramida yang disebutkan di dalam Undang-Undang, namun terdapat beberapa ciri utama yang dapat mengindikasikan bahwa bisnis tersebut menggunakan skema piramida, diantaranya adalah:⁵⁴

⁵⁴<http://bahasbisnis.com>, *Op. Cit.*,

1) Berfokus Pada Upaya Perekrutan Agen atau Distributor atau Mitra Penjual Baru Daripada Menjual Produk Akhir.

Ciri ini merupakan ciri yang utama dan dapat dilihat secara jelas karena meskipun skemanya hampir serupa dengan *Ponzi*, namun masih tetap ada produk yang diperjual belikan sebagai samaran bahwa bisnis ini berbeda dengan skema piramida yang dilarang di dalam Undang-Undang. Namun pada akhirnya skema seperti ini juga akan sama seperti *Ponzi* karena lama kelamaan mitra baru tidak cukup lagi direkrut untuk memberikan keuntungan dan hasilnya orang terakhir yang menjadi mitra dalam bisnis ini yang sangat merasakan kerugian karena tidak mendapatkan apa-apa dari bisnisnya.

2) Produk Hanya Laku Di Kalangan Tertentu

Produk yang diperjualbelikan di dalam skema bisnis ini hanya akan laku atau dibeli oleh para anggota atau agen saja, karena pada dasarnya barang tersebut tidak memiliki nilai kegunaan atau berharga rendah di pasaran, sehingga pihak yang membeli ini hanya orang-orang yang ingin bergabung ke dalam bisnis ini saja, dan tidak akan laku terjual apabila dipasarkan layaknya barang normal.

3) Promo Menjadi Sukses Yang Berlebihan

Ciri inilah yang menjadi faktor banyaknya masyarakat yang tergiur untuk masuk ke dalam bisnis ini, dan hal inilah yang seringkali menjadi alat yang menggiurkan untuk menarik anggota dan agen baru. Kisah sukses beberapa anggota atau agen yang sukses di dalam bisnis ini digunakan sebagai alat sponsor, padahal hal tersebut tidak sebanding atau tidak menggambarkan keseluruhan anggota bisnis ini karena tidak semuanya dapat meraih kesuksesan, terlebih lagi bagi para anggota atau agen yang tidak berhasil menarik anggota baru sehingga mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Tentu hal ini tidak akan diceritakan atau diungkap oleh para pelaku bisnis ini demi menjaga minat masyarakat untuk mau ikut bergabung ke dalam bisnis mereka.

c. Multi Level Marketing (MLM)

Multi Level Marketing atau yang lebih dikenal dengan singkatan MLM adalah sebuah metode pemasaran wirausaha dengan memanfaatkan sistem jaringan (*network*)⁵⁵. Dikatakan *network marketing* karena merupakan sebuah jaringan kerja pemasaran yang di dalamnya terdapat sejumlah orang yang melakukan aktifitas pemasaran produk ataupun jasa.

⁵⁵Royan F. M, **Rahasia Sukses Menjual (Sumber Inspirasi Distributor MLM dan Salesman)**, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2002, hlm, 7.

Secara umum, MLM adalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak tingkatan (level), yang biasa dikenal dengan istilah *upline* (tingkat atas) dan *downline* (tingkat bawah), seorang anggota dapat dikatakan sebagai *upline* apabila dia memiliki jaringan langsung di bawahnya atau *downline*.⁵⁶ Inti dari MLM adalah menjalankan jaringan baik secara vertikal ataupun horizontal atau bahkan gabungan dari keduanya.⁵⁷

Adapun cara kerja dari MLM ini dilakukan dengan cara mencari calon investor yang sekaligus berperan sebagai konsumen dan member dari perusahaan yang melakukan praktek MLM tersebut. Secara terperinci bisnis MLM dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁵⁸

1. Langkah pertama, perusahaan MLM menjaring calon pembeli untuk membeli paket produk perusahaan dengan harga tertentu. Pembelian paket produk ini juga sebagai syarat mutlak seorang pembeli dapat masuk ke dalam sistem perusahaan tersebut.

⁵⁶Sabiq A, *Multi Level Marketing*, Majalah Al-Furqon Edisi 11, 2005.

⁵⁷*Ibid.*,

⁵⁸*Ibid.*,

2. Dengan melakukan pembelian paket produk tersebut, pihak pembeli diberikan sebuah formulir keanggotaan dari perusahaan.

3. Setelah terdaftar menjadi member di perusahaan tersebut, aka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari member-member baru dengan cara di atas, yakni menjual barang dan mengisi formulir keanggotaan.

4. Kemudian seluruh member baru tersebut juga harus bertugas untuk menjaring member-member baru lagi dengan mengulang cara seperti di atas.

5. Jika member tersebut mampu menjaring dan menambah member baru ke dalam perusahaan yang secara otomatis menjadi *downline* dari member tersebut, maka ia akan mendapatkan bonus dari perusahaan. Semakin banyak member yang dapat dijaring, maka semakin banyak pula bonus yang didapatkan karena perusahaan juga diuntungkan dengan bergabungnya member yang juga sekaligus sebagai konsumen dari produk perusahaan.

6. Dengan adanya member baru ini, maka member yang berada pada level pertama, kedua dan seterusnya akan selalu mendapatkan bonus secara estafet dari perusahaan, karena perusahaan juga terus mendapatkan pemasukan dari

member-member baru yang mendaftar dan membeli produknya.

Dari keseluruhan ciri dan sistem kerja ketiga skema tersebut, ada satu hal yang terdapat dari ketiga skema tersebut, yaitu adanya penjualan produk secara langsung. Meskipun di dalam *Ponzi* hal tersebut bukan menjadi hal yang selalu ada, namun seringkali penjualan produk seperti MLM dan piramida digunakan demi menyamakan skema *Ponzi*, dan untuk sebuah perusahaan dapat melakukan penjualan langsung tersebut, maka perusahaan tersebut wajib mengantongi SIUPL (Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung) dan bukan hanya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), karena keduanya memiliki regulasi dan fungsi yang berbeda.

2. Regulasi dan Syarat Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)

Regulasi mengenai penerbitan surat izin usaha penjualan langsung ini diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pengertian *Direct Selling* atau penjualan langsung di dalam pasal 1, adalah:

“metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Mitra Usaha yang bekerja atas

dasar komisi dan/atau bonus atas penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.”⁵⁹

Dari mekanisme penjualan langsung ini, Menteri Perdagangan telah merumuskan persyaratan guna mengatur kegiatan *Direct Selling* ini, di dalam pasal 2 sebuah perusahaan wajib untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Memiliki atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
- b. Melakukan penjualan barang dan/atau jasa dan rekrutmen mitra usaha melalui sistem jaringan;
- c. Memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional dan tidak berbentuk skema jaringan pemasaran terlarang;
- d. Memiliki kode etik dan peraturan perusahaan yang lazim berlaku di bidang usaha penjualan langsung;
- e. Memiliki barang dan/atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan wajar;
- f. Memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- g. Memberikan komisi, bonus dan penghargaan lainnya berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh mitra usaha dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
- h. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

⁵⁹Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung

⁶⁰Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung

- memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya;
- i. Memiliki ketentuan tentang harga barang dan/atau jasa yang dijual dalam mata uang Rupiah (Rp) dan berlaku untuk mitra usaha dan konsumen;
 - j. Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual;
 - k. Memberikan alat bantu penjualan (*starter kit*) kepada setiap mitra usaha yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai barang dan/atau jasa, program pemasaran, kode etik dan/atau peraturan perusahaan;
 - l. Memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon mitra usaha untuk memutuskan menjadi mitra usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula;
 - m. Memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada mitra usaha dan konsumen untuk mengembalikan barang, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - n. Membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, katalog, atau *leaflet*), dan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal mitra usaha ke perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh mitra usaha berkaitan dengan pembelian barang tersebut, apabila mitra usaha mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan;
 - o. Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian;
 - p. Memberi kompensasi berupa ganti dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
 - q. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para mitra usaha, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggungjawab;

- r. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua mitra usaha untuk berprestasi dalam memasarkan barang dan/atau jasa;
- s. Melakukan pendaftaran atas barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan pada instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan, dan mencantumkan nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung pada setiap label produk.

Sedangkan untuk perusahaan yang menggunakan skema *Ponzi* dan piramida sudah sangat jelas bahwa perusahaan tersebut melanggar beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri ini, sebagaimana di dalam Pasal 2 huruf c dan e, dimana dalam skema *Ponzi* dan piramida tidak memiliki program pemasaran yang transparan, bagaimana uang para investor atau mitra usaha tersebut diputar kembali dalam bentuk usaha lain, sebagian besar para investor tidak mengetahui sistem kerja perputaran uang mereka secara jelas, selain itu skema piramida juga sudah jelas dilarang. Selain itu, kedua skema ini juga melanggar huruf e dimana perusahaan skema piramida maupun *Ponzi* memberikan harga yang tidak wajar kepada para investornya.

Selain itu, di dalam Peraturan Menteri ini setiap perusahaan juga diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) untuk mendapatkan status legalitasnya. Adapun mengenai SIUPL diatur di dalam pasal 12 – pasal 16. Namun, untuk penerbitan SIUPL berdasarkan Permendag No.96/M-DAG/PER/12/2014 jo. No.10/M-DAG/PER/11/2015, terjadi pelimpahan kewenangan penerbitan SIUPL

dari Kementerian Perdagangan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau yang disingkat dengan BKPM.

Di dalam Peraturan Menteri Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 menyebutkan bahwa perusahaan MLM harus berbadan hukum Indonesia dan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Aturan tersebut terdapat di dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:

“Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas.”⁶¹

Adapun larangan terhadap perusahaan yang telah memiliki SIUPL terdapat di dalam Pasal 21 yang berbunyi:⁶²

Perusahaan yang telah memiliki SIUPL, dilarang melakukan kegiatan:

- a. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. Menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen;
- c. Menawarkan barang dan/atau jasa dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen;

⁶¹Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung

⁶²Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung

- d. Menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan;
- e. Menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar;
- f. Menerima pendaftaran keanggotaan sebagai mitra usaha dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali;
- g. Mengharuskan atau memaksakan kepada mitra usaha membeli barang dan/atau jasa untuk dijual atau pemakaian sendiri dalam jumlah besar yang melebihi kemampuannya dalam menjual;
- h. Menjual atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tercantum di dalam SIUPL di luar sistem penjualan langsung;
- i. Usaha perdagangan yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat;
- j. Membentuk jaringan pemasaran terlarang dengan nama atau istilah apapun;
- k. Usaha perdagangan di luar SIUPL yang diberikan;
- l. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL dan/atau;
- m. Menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label produknya tidak tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung.

Terhadap perusahaan MLM yang telah memiliki SIUPL namun tetap melakukan larangan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri tersebut, akan diberikan sanksi berupa sanksi administratif peringatan

tertulis dari pejabat penerbit SIUPL, pemberhentian sementara SIUPL dalam waktu 1 bulan, dan pencabutan SIUPL.

Melalui penerbitan SIUPL ini, maka masyarakat dapat mengetahui mengenai legalitas sebuah perusahaan MLM ataupun perusahaan yang menjalankan skema *Ponzi* namun disamarkan dengan skema MLM. Misalnya dengan melihat dari segi aspek bentuk perusahaan apakah perusahaan tersebut berbentuk perseroan, memiliki kantor tetap dengan alamat yang jelas, serta ada atau tidaknya izin dari instansi terkait dengan jenis usaha perusahaan tersebut, misalnya untuk perusahaan yang menjual obat atau suplemen makanan, maka perlu mendapatkan izin setidaknya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ataupun Departemen Kesehatan, dan apabila menjual jasa dalam bentuk travel perjalanan umroh, maka perlu mendapatkan izin dari Kementerian Agama.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Sesuai dengan jenis penjualan langsung baik barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam skema *Ponzi*, piramida, ataupun MLM, maka tentu akan sangat berkaitan dengan regulasi yang ditentukan di dalam Undang-Undang Perdagangan. Di dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai sistem penjualan barang langsung.

Adapun mengenai transaksi penjualan secara langsung diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) yang menjelaskan bahwa:

“Distribusi barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:

a. Single level; atau

b. Multi level.”⁶³

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara multi level” adalah penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dilakukan oleh mitra usaha ataupun investor yang bekerja atas komis dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang dan/atau jasa kepada konsumen.

Di dalam Undang-Undang ini juga telah dibahas mengenai larangan perusahaan melakukan kegiatan usahanya menggunakan skema piramida yang diatur di dalam Pasal 9, yang berbunyi:

“Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.”⁶⁴

Larangan penjualan dengan skema piramida telah dijelaskan di dalam Undang-Undang ini, namun skema *Ponzi* yang semakin banyak digunakan tidak disebutkan secara jelas, sehingga terjadi kekaburan hukum apakah penindakan dari skema ini dapat menggunakan regulasi tentang skema piramida atau dibedakan. Larangan ini menunjukkan bahwa jika ada sebuah perusahaan yang menggunakan sistem piramida tersebut, maka perusahaan tersebut sudah pasti merupakan perusahaan ilegal,

⁶³Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁶⁴Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

ataupun perusahaan bermodus MLM karena pada prinsipnya hanya mencari keuntungan dari orang-orang yang mendaftar belakangan, bukan dari hasil penjualan produk, meskipun semakin banyak perusahaan yang nyatanya menggunakan skema *Ponzi* namun disamarkan dengan melakukan penjualan barang dan/atau jasa.

Sementara untuk perizinan melakukan kegiatan usaha, disebutkan di dalam Pasal 24 yang menjelaskan:⁶⁵

“Ayat (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

Ayat (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah daerah atau instansi teknis tertentu.

Ayat (3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Bagi perusahaan yang melanggar aturan yang telah ditentukan dan menimbulkan kerugian akibat perbuatannya, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 105 dan Pasal 106.

Di dalam Pasal 105 menjelaskan bahwa:⁶⁶

“Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara

⁶⁵Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁶⁶Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sedangkan di dalam Pasal 106 menjelaskan bahwa:⁶⁷

“Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan penjualan barang secara langsung wajib memiliki SIUPL yang dikeluarkan oleh BKPM dan diatur di dalam Peraturan Menteri, selain itu bisnis yang menggunakan skema piramida dalam aktifitasnya juga sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan atau bisnis tersebut adalah ilegal. Namun, skema *Ponzi* tidak diatur sama sekali di dalam Peraturan Menteri ataupun Undang-Undang Perdagangan ini, sehingga untuk penindakan perusahaan yang menggunakan skema *Ponzi* ini masih belum ada kejelasan regulasi mana yang harus digunakan dan seringkali masih menggunakan pasal mengenai skema piramida.

⁶⁷Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

B. Peran OJK Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Investor Dalam Skema *Ponzi*

Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK, di dalam dunia investasi terdapat lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga bertugas untuk mengawasi aktifitas investasi namun berfokus pada dunia penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dibentuk dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Di dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa:⁶⁸

“BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Sedangkan di dalam Pasal 3, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi:⁶⁹

- a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;

⁶⁸Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

⁶⁹Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

- d. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- e. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- f. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- g. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
- h. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- i. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan, penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- j. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- l. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- m. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga, dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi dari BKPM tersebut, maka sebagai bentuk langkah preventif, BKPM ikut bergabung ke dalam Satuan Tugas Waspada Investasi bersma dengan OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, dan Kepolisian pada awalnya, dan

kemudian ada enam kementerian serta lembaga yang bergabung , yaitu Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), seluruh kementerian dan lembaga tersebut bergabung untuk mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.⁷⁰

Satuan tugas ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007, dan setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan, Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Nota kesepakatan antar pimpinan seluruh institusi yang tergabung di dalam satgas ini disusun sebagai payung hukum guna memperkuat komitmen bersama seluruh lembaga tersebut dalam pelaksanaan tugas pokok Satgas Waspada Investasi.

Revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi antara lain meliputi:⁷¹

⁷⁰<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592814d142927/mencermati-aspek-pencegahan-dan-penindakan-praktik-penipuan-berkedok-investasi>, diakses pada 26 April 2018.

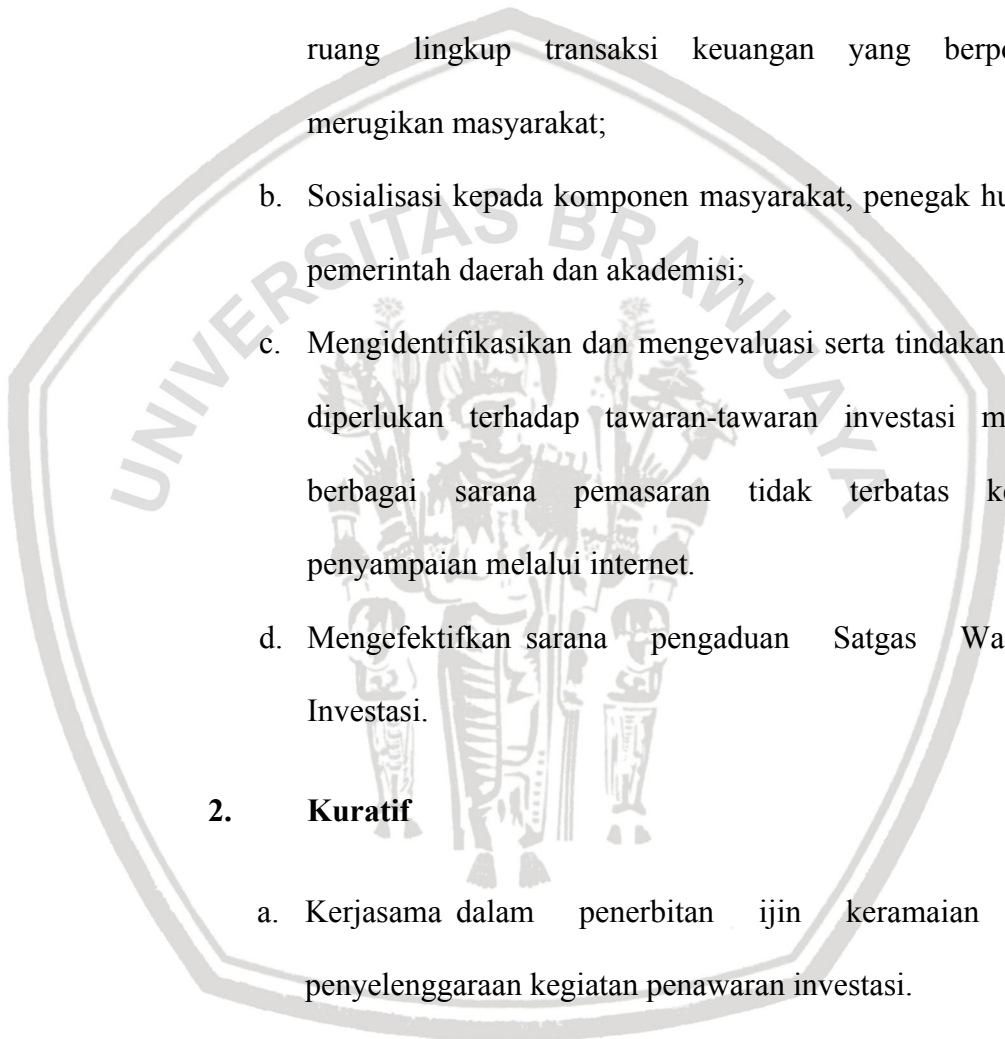
⁷¹Siaran Pers OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi No. SP-57/DKNS/OJK/6/2016.

1. Preventif

- a. Koordinasi antara anggota Satgas Waspada Investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat;
- b. Sosialisasi kepada komponen masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah dan akademisi;
- c. Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap tawaran-tawaran investasi melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada penyampaian melalui internet.
- d. Mengefektifkan sarana pengaduan Satgas Waspada Investasi.

2. Kuratif

- a. Kerjasama dalam penerbitan ijin keramaian atau penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi.
- b. Melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat agar mendapatkan ijin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



3. **Represif** yang berupa melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan Perundang-Undangan.

Satuan Tugas ini juga telah sepakat untuk membentuk Tim Satgas Waspada Investasi di tingkat daerah dengan perwakilan anggota dari lembaga yang sama dengan Satuan Tugas Waspada Investasi pada tingkat pusat. Tim Satgas di daerah ini diharapkan dapat menjadi sarana koordinasi antara Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan dengan instansi atau dinas di pemerintah daerah terkait.⁷²

Di dalam satgas tersebut, peran OJK tentu sangat dominan, karena OJK merupakan lembaga yang paling terdepan dalam menyelenggarakan sisten pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁷³ Lembaga Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU OJK Pasal 4, menjelaskan mengenai tujuan dibentuknya OJK adalah sebagai berikut:⁷⁴

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”

Terkait dengan tujuan dibentuknya OJK tersebut, dalam upaya untuk ikut serta dalam melawan investasi ilegal dan memberikan

⁷²*Ibid.*,

⁷³Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁷⁴Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

perlindungan hukum terhadap para investor, OJK memiliki dua strategi yang sangat vital, yaitu:⁷⁵

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah represif.
- b. Membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.

Apabila dijabarkan secara lebih mendetail, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh OJK guna memberikan perlindungan hukum kepada para investor yang dirugikan akibat adanya investasi ilegal dan terutama investasi dengan skema *Ponzi* yang sedang banyak terjadi belakangan ini dibagi menjadi langkah preventif dan represif sebagai berikut:

1. Preventif

- a. **Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi**

⁷⁵<https://ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/116>, diakses pada 1 Mei 2018.

Sosialisasi program pencegahan tindakan melawan hukum dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat ataupun investasi ini ditujukan untuk memberikan informasi dan mengingatkan kepada masyarakat luas agar dapat lebih waspada terhadap tawara-tawaran jenis penanaman modal atau investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal dan dengan disertai dengan adanya iming-iming keuntungan atau *return* yang tinggi serta diluar kewajaran, sehingga masyarakat lebih mengerti dan tidak lagi terjebak ke dalam investasi fiktif ataupun ilegal.⁷⁶ Hal ini dilakukan mengingat bahwa di kalangan masyarakat skema *Ponzi* ini masih sulit dikenali karena biasanya menyaru dengan skema MLM, sehingga masyarakat dapat lebih paham bagaimana skema *Ponzi* bekerja dan skema investasi apa saja yang legal yang dapat mereka ikuti, sehingga kewaspadaan masyarakat dapat lebih meningkat.

b. Pemberian Izin Usaha Oleh Otoritas Terhadap Pihak Yang Menghimpun Dana Masyarakat

Kegiatan operasional lembaga, orang perseorangan, dan perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara ilegal tidak dilengkapi dokumen perizinan dari OJK, oleh sebab itu masyarakat harus memastikan bahwa orang atau perusahaan yang melakukan penawaran investasi telah memiliki izin sesuai dengan

⁷⁶Dian Husna Fadlia, *Jurnal Law Reform Vol 11 Nomor 2*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015, hlm. 210.

peruntukannya dari lembaga terkait sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.⁷⁷ Terlebih lagi bagi perusahaan yang menjalankan skema *Ponzi*, sudah pasti tidak akan ada ijin dari lembaga terkait terutama OJK, karena dalam pemberian ijinnya OJK telah semakin selektif untuk menentukan *investee* atau lembaga keuangan mana yang layak.

c. Mengoptimalkan Fungsi Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi atau *Integrated Financial Customer Care (IFCC)*

Pada bulan Februari 2014, Otoritas Jasa Keuangan telah meluncurkan Program Layanan Konsumen Terintegrasi dengan peningkatan pelayanan melalui sistem yang memiliki fasilitas *trackable* dan *traceable*. Fitur *traceable* adalah fitur yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mengetahui dan/atau mengambil alih pengaduan konsumen kepada lembaganya untuk mengupayakan penyelesaian pengaduan tersebut. Sementara *trackable* adalah fitur yang dapat diakses oleh Konsumen ataupun investor yang dalam hal ini adalah sebagai pelapor untuk mengetahui status perkembangan pengaduan yang disampaikan pada OJK. Layanan Konsumen Terintegrasi ini ditujukan agar tugas dan amanat OJK sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK yaitu

⁷⁷*Ibid.*,

fungsi edukasi dan perlindungan konsumen bisa dilaksanakan dengan baik.⁷⁸

Keterlibatan PUJK dalam layanan konsumen diatur di dalam Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa:⁷⁹

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.”

Dengan adanya layanan Konsumen Terintegrasi ini secara otomatis akan dapat lebih memudahkan Konsumen dan PUJK dalam melakukan penyelesaian pengaduan kasus-kasus investasi dengan skema *Ponzi* yang semakin menyebar luas dan merugikan para investornya dengan jumlah yang tidak sedikit.

d. Dikeluarkannya Peraturan Pelaksana Penawaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan

Pada tahun 2014, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan atau Layanan Jasa Keuangan. Surat Edaran tersebut merupakan bentuk implementasi dari Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang

⁷⁸Siaran Pers OJK Tingkatkan Layanan Konsumen Terintegrasi (*Integrated Financial Customer Care*) 2014.

⁷⁹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

efektif dan berlaku sejak 6 Agustus 2014. Surat edaran ini mengatur mengenai penawaran oleh PUJK harus menggunakan data yang telah disetujui oleh konsumen atau masyarakat yang bersedia dihubungi melalui sarana SMS, telepon ataupun *email*.⁸⁰

Berdasarkan langkah preventif yang telah diupayakan oleh OJK, maka pada dasarnya telah ada langkah-langkah pencegahan yang dilakukan guna mencegah perkembangan investasi pada bisnis skema *Ponzi* ini, OJK telah mengupayakan bentuk edukasi dan sosialisasi sebagai upaya terdepan dalam mencerdaskan masyarakat agar tidak salah memilih jenis investasi. Hal ini dilakukan karena adanya kebebasan dari masyarakat untuk menentukan jenis investasi apa yang ingin mereka lakukan, sehingga langkah pencegahan yang paling utama terdapat pada masyarakat atau calon investor itu sendiri.

Selain itu pemberian ijin yang dikeluarkann oleh OJK juga semakin diperketat dan semakin selektif dalam menentukan *investee* mana yang layak untuk mendapatkan ijin dari OJK, hal ini tentu sangat penting guna mencegah laju perkembangan *investee* yang menggunakan skema *Ponzi*.

2. Represif

a. Menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁸⁰Dian Husna Fadlia, *Op.Cit.*,

Penerbitan peraturan ini dilakukan sebagai pedoman bagi seluruh lembaga jasa keuangan dan masyarakat, khususnya menjadi standarisasi dan patokan mengenai lembaga keuangan apa saja yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, apa saja jenis pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, dan bagaimana tahapan pengaduan tersebut dilakukan, serta syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum melakukan pelaporan.⁸¹ Hal ini guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait investasi ilegal dan perlindungan apa saja yang mereka dapatkan, meskipun tidak secara langsung menyebutkan mengenai skema *Ponzi*.

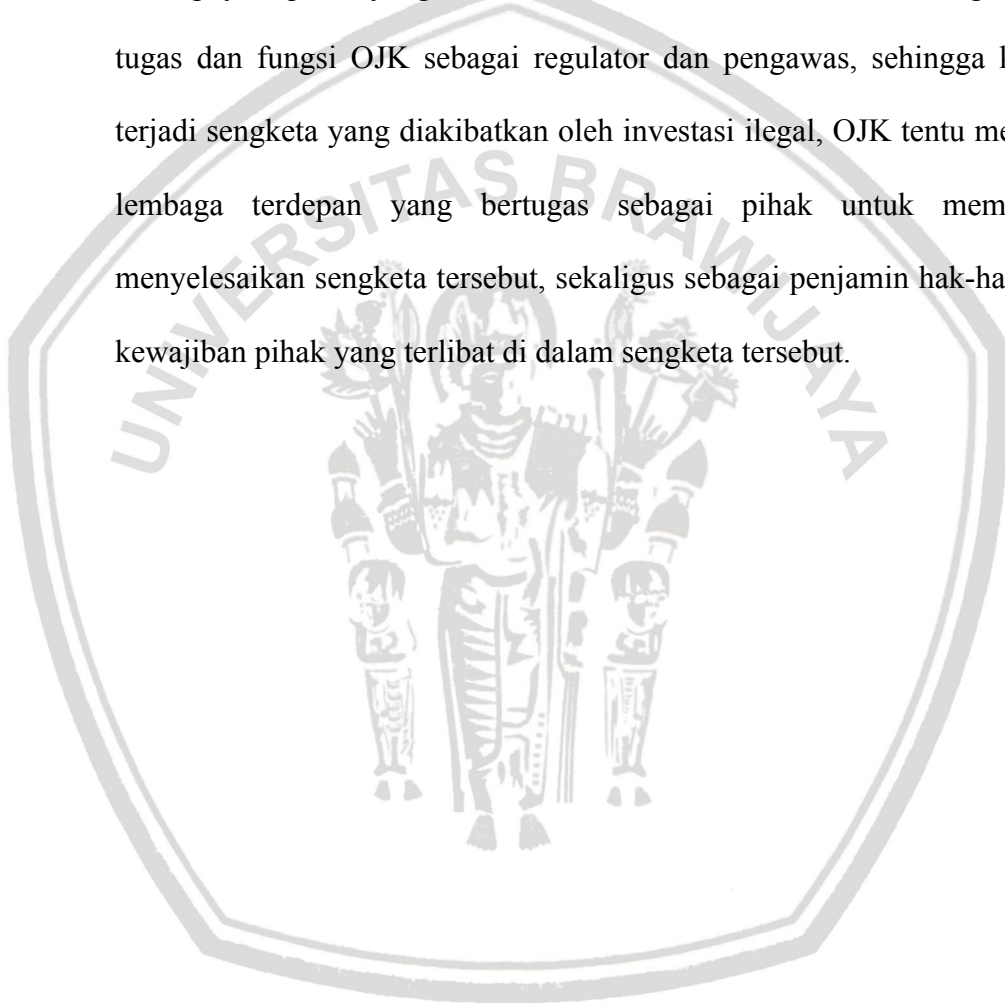
b. Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Di dalam kegiatan bertransaksi keuangan tentu saja akan menimbulkan adanya resiko atau adanya kemungkinan terjadi sengketa di masa depan, sehingga OJK sebagai regulator telah mengatur adanya kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Apabila di dalam penyelesaiannya tidak terjadi kata sepakat diantara kedua belah pihak baik konsumen atau investor dan lembaga jasa keuangan, maka kedua belah pihak dapat menempuh jalur pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Mekanisme penyelesaian sengketa ini juga sejalan dengan amanat dari Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, di

⁸¹*Ibid.*,

mana di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa OJK diharuskan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang telah dirugikan oleh lembaga jasa keuangan sesuai dengan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Upaya represif yang dilakukan oleh OJK ini telah sesuai sebagaimana tugas dan fungsi OJK sebagai regulator dan pengawas, sehingga ketika terjadi sengketa yang diakibatkan oleh investasi ilegal, OJK tentu menjadi lembaga terdepan yang bertugas sebagai pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut, sekaligus sebagai penjamin hak-hak dan kewajiban pihak yang terlibat di dalam sengketa tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan atas bahasannya tersebut, yaitu:

1. Bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam bisnis skema *Ponzi* di Indonesia masih terdapat kekaburan hukum terhadap skema *Ponzi* yang tidak disebutkan di dalam Undang-Undang ataupun peraturan lainnya, sehingga masih sering disamakan dengan skema piramida yang telah disebutkan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, padahal keduanya memiliki perbedaan di dalam skemanya yang terkadang sulit untuk dibedakan. Sehingga perlu diperjelas mengenai regulasi yang mengatur investasi dengan skema *Ponzi* ini, karena skema ini sudah sangat sering digunakan dan telah menimbulkan kerugian dengan jumlah yang besar, namun di dalam Undang-Undang yang berlaku sekarang belum disebutkan larangan mengenai skema ini, sehingga di dalam penindakannya masih mengacu terhadap skema piramida.
2. OJK sebagai regulator dengan lembaga terkait lainnya telah membuat langkah-langkah baik itu preventif hingga upaya represif guna menekan pertumbuhan investasi ilegal terutama *Ponzi* yang masih belum memiliki

regulasi yang jelas. Perlindungan yang dilakukan tersebut telah diupayakan, namun tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tidak ada peran serta dari masyarakat untuk peduli dan menambah wawasannya mengenai investasi apa saja yang dapat mereka ikuti, masyarakat masih melakukan aktifitas investasinya hanya berdasarkan keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa memperhatikan resiko yang mungkin dapat terjadi. Hal ini diperparah dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap hak-hak yang dimilikinya serta kurangnya kesadaran hukum untuk melaporkan kepada lembaga terkait apabila mereka menjadi korban penipuan investasi ilegal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan baik untuk pemerintah, masyarakat, maupun Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memperjelas regulasi mengenai investasi dengan skema *Ponzi*, mengingat semakin berkembangnya dinamika dunia investasi di Indonesia, maka regulasinya pun sudah seharusnya mengikuti arus investasi yang berkembang. Sehingga kedepannya dapat dibedakan secara jelas mengenai skema *Ponzi*, piramida, ataupun MLM. Hal ini harus dilakukan agar tidak lagi terjadi kekaburan antara investasi

apa saja yang dilarang di Indonesia, dan agar skema *Ponzi* dengan skema piramida tidak lagi disamakan ketika terjadi kasus serupa. Selain itu regulasi mengenai pemberian sanksi terhadap skema *Ponzi* ini juga harus diatur secara jelas karena kerugian yang diakibatkan oleh skema ini sering kali jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan skema piramida ataupun MLM ilegal.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai calon investor sebaiknya sebelum memutuskan untuk bergabung di dalam suatu skema investasi tertentu harus mengetahui apakah perusahaan bisnis investasi tersebut merupakan bisnis yang legal dengan melihat izin dari lembaga terkait, baik itu OJK maupun Kementerian terkait, serta apakah perusahaan tersebut memiliki SIUPL atau tidak dan apakah terdaftar sebagai anggota APLI atau tidak. Selain itu masyarakat juga harus melihat ada atau tidaknya kantor perusahaan investasi tersebut, serta bagaimana sistematika pengelolaan investasi yang dijalankan.

3. Bagi OJK

OJK sebagai lembaga pengawas dan sebagai regulator diharapkan dapat mengkoordinir semua regulasi mengenai investasi ilegal di Indonesia. OJK juga diharapkan dapat membuat regulasi khusus guna mencegah terjadinya investasi ilegal dengan skema *Ponzi* semakin berkembang di masyarakat. Baik tentang larangan dan sanksi yang akan diberikan apabila terdapat perusahaan yang menjalankan skema *Ponzi* tersebut. Hal

ini juga demi memberikan perlindungan hukum dan edukasi kepada para investor yang ingin menanamkan modalnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agus Kretarto, 2001, ***Investor Relation: Pemasaran dan Komunikasi Keuangan Berbasis Kepatuhan***, Jakarta: Grafiti Pers.
- Ana Rokhmatussa'dyah, 2009, ***Hukum Investasi & Pasar Modal***, Sinar Grafika, Malang.
- Chainur Arrasjid, 2000, ***Dasar-Dasar Ilmu Hukum***, Sinar Grafika, Medan.
- Dian Husna Fadlia, 2015, ***Jurnal Law Reform Vol 11 Nomor 2***, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Dhaniswara K. Harjono, 2007, ***Hukum Penanaman Modal***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti, ***Penelitian Hukum (Legal Research)***, Sinar Grafika.
- Imam Sjahputra Tunggal, ***Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia***, Jakarta, Havarindo.
- Muchsin, 2003, ***Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia***, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, ***Penelitian Hukum***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus Hadjon, 1987, ***Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia***, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Soeharso, 1992, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Sinar Grafika, Bandung.
- Royan F. M, 2002, ***Rahasia Sukses Menjual (Sumber Inspirasi Distributor MLM dan Salesman)***, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Sabiq A, 2005, ***Multi Level Marketing***, Majalah Al-Furqon Edisi 11.
- Satjipto Rahadjo, 2003, ***Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia***, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1990, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Rajawali Press, Jakarta.

Tim Studi Riil Investor di Pasar Modal Indonesia, 2009, "**Laporan Studi Riil Investor di Pasar Modal Indonesia**", Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan.

Zaeni Asyhadie, 2011, **Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Palu.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara No. 67 tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara No. 45 tahun 2014.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

INTERNET:

<http://bahasbisnis.com/2017/08/27/apa-itu-skema-ponzi-piramida-dan-money-game/>

<https://www.biutiva.com/956/apa-itu-skema-piramida-ponzi-apa-mlm-masuk-didalamnya>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5925388dbec70/skema-ponzi--jerat-penipuan-investasi-dengan-korban-bernilai-triliunan>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592814d142927/mencermati-aspek-pencegahan-dan-penindakan-praktik-penipuan-berkedok-investasi>.

<https://howmoneyindonesia.com/2015/06/01/perbedaan-ponzi-dan-skema-piramida-pyramid-scheme/>

<http://infobanknews.com/memahami-skema-ponzi-dan-bedanya-dengan-mlm/2/>

Info APLI Edisi XXVII Januari-Maret 2005.

W.J.S. Poerwadardaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)
<http://kamusbahasaIndonesia.org/perlindungan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Gramatikal (online),
<https://kbbi.web.id/gramatikal>.

<https://ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/116>

Siaran Pers OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi No. SP-57/DKNS/OJK/6/2016.

